



Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 03 Januari 2017

Halaman: 1

PERILAKU AJI MUMPUNG BANYAK DILAKUKAN WARGA KOTA JOGJA

BUTUH PERDA TARIF WISATA

JOGJA - Ramainya pemberitaan negatif terkait perilaku buruk sebagian pelaku pariwisata di Jogjakarta, langsung disikapi Kepala Dinas Pariwisata DIJ Aris Riyanta dengan melakukan pengecekan ke beberapa objek wisata. Hasilnya, mayoritas perilaku aji mumpung terjadi di wilayah Kota Jogja.

"Sudah saya cek, di Taman Breksi dan Kaliurang, Sleman tidak terjadi, yang terjadi justru di pusat Kota Jogja," ujar Aris saat dihubungi, kemarin (2/1). Diakunya selama *peak season* liburan ada yang menaikkan harga itu lumrah, selama masih dalam batas kewajaran. » *Baca Butuh... Hal 7*

Jogja Sudah Punya Perda, Tinggal Penegakannya

■ BUTUH...
Sambungan dari hal 1

"Naik 20-30 persen itu wajar, kalau sudah berlipat-lipat itu *yo nuthuk jenenge*," sambungnya. Aris mengatakan, kewajaran tersebut tidak bisa ditentukan subyektif pelaku wisata saja. Untuk itu, lanjut dia, setiap pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek), pihaknya selalu berpesan supaya pelaku pariwisata juga berempati pada wisatawan. Tidak bisa aji mumpung dengan alasan supaya cepat balik modal.

"Padahal November-Desember lalu baru kami bimtek untuk pelaku wisata di Pakualaman, Keraton, dan Alun-Alun Kidul, tapi *kok* ya masih terjadi," sesalnya.

Terkait adanya penindakan tegas, Aris mengatakan, tidak bisa memberi sanksi selama tidak ada pelanggaran perda. "Makanya kami bisanya ya mengimbau," ungkapnya.

Menurutnya, kabupaten dan kota yang selama ini menikmati hasil dari pariwisata, seharusnya selangkah lebih depan. Termasuk pembuatan regulasi yang mengatur tarif pariwisata.

"Kalau ada perda, yang melanggar bisa kena sanksi. Kewenangan pembuatan Perda Pariwisata *kan* ada di kabupaten dan kota," lanjutnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Jogja M. Ali Fahmi mengatakan, Kota Jogja tidak perlu lagi membuat perda baru, yang khusus mengatur terkait tarif. Fahmi mengatakan, di Kota Jogja sudah ada Perda No 4/2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata maupun Perda No 3/2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Jogja 2015-2025. "Tinggal pelaksanaan perda yang dimaksimalkan," ujarnya.

Politikus PAN itu menambahkan, di dalam dua perda tersebut sudah mengatur kewajiban pelaku wisata setempat. Fahmi mengutip pasal 35 huruf f Perda 3/2015, disebutkan strategi pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata dengan meningkatkan pemahaman, dukungan, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan nilai Sapta Pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan setempat. "Untuk mewujudkan Sapta Pesona itu sudah dilakukan belum," ujarnya setengah bertanya.

Tak Hanya Fisik, Fokus pada Perilaku Warganya

Tak cuma perilaku aji mumpung saja yang jadi sorotan. Perilaku pedagang kaki lima (PKL) Malioboro yang tak menjaga kawasan pedestrian yang baru diresmikan juga jadi buah bibir. Kepala Dinas Kebudayaan DIJ Umar Priyono mengatakan, begitu responsifnya masyarakat, menunjukkan bahwa Malioboro sudah menjadi milik bersama. Jadi nantinya, pada pembangunan tahap dua pedestrian tidak hanya fokus pada fasad fisiknya saja. Tapi, juga fokus pada pemahaman semua pihak untuk saling menjaga.

"Jadi sumber pembelajaran untuk pemangku kepentingan yakni pemerintah, pebisnis, dan komunitas yang ada di Malioboro," paparnya.

Diakunya, saat ini pembangunan Malioboro masih dalam proses bertahap. Ke depan bisa jadi sebuah panggung terbuka, baik untuk kebudayaan dan pariwisata. Selama proses itu berjalan masih banyak yang bisa diperbaiki, misal penataan PKL berikut lapak-lapakannya.

"Dinas PUP-ESDM sudah membuat desain untuk menata lapak-lapak PKL. Harapannya PKL bisa merawat dengan mengelola limbah dan sampahnya," ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas PUP-ESDM Ranni Sjamsinarasih mengatakan, setelah tahap satu selesai, masih ada tiga tahap lagi yang direncanakan selesai pada 2019. Revitalisasi Malioboro masih berlanjut ke tahap kedua. Rancangannya meliputi dari Pasar Beringharjo hingga Titik Nol Kilometer (sisi timur). Kemudian dari Kejaman hingga Titik Nol (sisi barat). Sedangkan di depan Gedung BI akan dibangun toilet bawah tanah. "Gubernur kemarin sempat meminta ada percepatan untuk 2018," ujarnya. (*pra/dya/lla/ga*)

TIDAK TEPAT: PKL membuang limbahnya di saluran air di kawasan Malioboro. Pengelolaan limbah PKL menjadi fokus untuk pembangunan pedestrian ke depan.

menunjukkan bahwa Malioboro sudah menjadi milik bersama. Jadi nantinya, pada pembangunan tahap dua pedestrian tidak hanya fokus pada fasad fisiknya saja. Tapi, juga fokus pada pemahaman semua pihak untuk saling menjaga.

"Jadi sumber pembelajaran untuk pemangku kepentingan yakni pemerintah, pebisnis, dan komunitas yang ada di Malioboro," paparnya.

Diakunya, saat ini pembangunan Malioboro masih dalam proses bertahap. Ke depan bisa jadi sebuah panggung terbuka, baik untuk kebudayaan dan pariwisata. Selama proses itu berjalan masih banyak yang bisa diperbaiki, misal penataan PKL berikut lapak-lapakannya.

"Dinas PUP-ESDM sudah membuat desain untuk menata lapak-lapak PKL. Harapannya PKL bisa merawat dengan mengelola limbah dan sampahnya," ujarnya.

Terpisah, Kepala Dinas PUP-ESDM Ranni Sjamsinarasih mengatakan, setelah tahap satu selesai, masih ada tiga tahap lagi yang direncanakan selesai pada 2019. Revitalisasi Malioboro masih berlanjut ke tahap kedua. Rancangannya meliputi dari Pasar Beringharjo hingga Titik Nol Kilometer (sisi timur). Kemudian dari Kejaman hingga Titik Nol (sisi barat). Sedangkan di depan Gedung BI akan dibangun toilet bawah tanah. "Gubernur kemarin sempat meminta ada percepatan untuk 2018," ujarnya. (*pra/dya/lla/ga*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Malioboro			

Yogyakarta, 31 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005